

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENAGANI KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Aulia Rahmawati¹, Andre Pernanda^{2*}, Syeka Ferlian Syah³, Ahmad Zani Iswandha⁴, Fauzan Nuris⁵.

1, 2, 3, 4, 5 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted November, 2025

Available November Oktober, 2025

andre.22111023@student.ubl.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, efektivitas PKH dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka untuk menelaah implementasi PKH di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif, seperti meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima, partisipasi pendidikan anak, serta akses kesehatan bagi kelompok rentan. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan data penerima, keterbatasan pendamping sosial, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Faktor pendukung meliputi kuatnya kebijakan nasional, dukungan pemerintah daerah, serta peran aktif pendamping sosial dalam mendampingi keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, PKH, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program aimed at reducing poverty by increasing access for poor families to education, health, and social welfare services. Based on Merilee S. Grindle's policy implementation theory, PKH's effectiveness is influenced by the policy's content and the context in which it is implemented. This study uses a qualitative method through a literature review to examine PKH implementation in Bandar Lampung City. The results show that PKH has positive impacts, such as improving the fulfillment of basic needs of recipient families, children's educational participation, and access to health care for vulnerable groups. However, implementation still faces obstacles such as inaccurate recipient data, limited social assistance, and community dependence on assistance. Supporting factors include strong national policies, local government support, and the active role of social assistance in assisting recipient families.

Keywords: Family Hope Program, PKH, Policy Implementation, Poverty, Bandar Lampung City.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih merupakan masalah penting dalam proses pembangunan nasional Indonesia. Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan, seperti ketidakmampuan ekonomi dan keterbatasan akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan

*Corresponding author

E-mail addresses: andre.22111023@student.ubl.ac.id



partisipasi sosial. Pemerintah Indonesia terus menerapkan kebijakan dan program sosial untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menurunkan angka kemiskinan (Qulsum et al., 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 25,22 juta orang, atau 9,03 persen, tetapi pada tahun 2025 turun menjadi 23,85 juta orang, atau 8,47 persen, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan telah bekerja dengan baik, tetapi masih belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan struktural di banyak tempat.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Nasional (2023-2025)

Tahun	Persentase penduduk miskin (%)	Jumlah penduduk miskin (juta orang)
2023	9,36 %	26,36 juta
2024	9,03 %	25,22 juta
2025	8,47 %	23,85 juta

Sumber : Badan Pusat Statistik RI.go.id

Penurunan jumlah kemiskinan di negara ini tidak terjadi tanpa bantuan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH paling strategis karena menyasar langsung rumah tangga yang sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai serta mendorong perubahan perilaku. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. PKH ditujukan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki elemen pendidikan (anak sekolah SD hingga SMA), kesehatan (ibu hamil dan balita), dan sosial (lansia dan penyandang disabilitas berat). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, dan memecahkan rantai kemiskinan antar generasi (Julfani & Putra, 2023).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin di Indonesia. Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penangulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Nuraulia et al., 2023).

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar di Pulau Sumatera, Lampung menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Provinsi Lampung masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Tabel 1. 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung (2023-2025)

Tahun	Persentase penduduk miskin (%)	Jumlah penduduk miskin (Ribuan orang)
2023	11,11 %	970,67 ribu
2024	10,62 %	939,30 ribu
2025	10,00 %	910,00 ribu

Sumber : Badan Pusat Statistik provinsi lampung.go.id

Meskipun data menunjukkan penurunan, tingkat kemiskinan di Lampung masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pelaksanaan program-program bantuan sosial, khususnya PKH, agar dapat menyentuh masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain menurunnya tingkat kemiskinan, data dari Satu Data Lampung (2025) juga menunjukkan perubahan jumlah penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai (KPM PKH)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penerima Bantuan Sosial (KPM PKH)	431.265 KPM	450.069 KPM	471.520 KPM	465.475 KPM	434.653 KPM	414.075 KPM	390.779 KPM

Sumber : opendata.lampungprov.go.id

Jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa program ini menjangkau ratusan ribu keluarga. Namun, masih terdapat tantangan seperti validasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mutakhir, keterbatasan pendamping sosial, serta rendahnya partisipasi penerima dalam kegiatan pemberdayaan.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nasional. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan, kota ini menjadi representasi daerah perkotaan yang menghadapi kompleksitas persoalan sosial-ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan perkotaan. Walaupun menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Sasmita et al., 2023).

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bandar Lampung menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun masih menghadapi masalah kesenjangan sosial. Berdasarkan data BPS Kota Bandar Lampung (2025), persentase penduduk miskin menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Tingkat Kemiskinan Kota Bandar Lampung (2023-2025)

Tahun	Persentase penduduk miskin (%)	Jumlah penduduk miskin (Jiwa)
2023	7,85 %	86.400 jiwa
2024	7,37 %	81.700 jiwa
2025	6,95 %	77.800 jiwa

Sumber : [Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.go.id](https://badanpusatstatistik.kotabandarlampung.go.id)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan di kota ini mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,21 persen, kemudian menurun menjadi 7,37 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 6,95 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki peran nyata dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, dalam pelaksanaannya, program PKH di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi di lapangan akibat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya mutakhir. Beberapa masyarakat yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan masih tercatat sebagai KPM, sementara sebagian keluarga miskin baru belum masuk dalam daftar penerima. Selain itu, rasio pendamping sosial dengan jumlah KPM yang besar menyebabkan kurang optimalnya proses pendampingan, pemantauan, dan evaluasi (Annisya & Novira, 2023).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam menagani kemiskinan di kota bandar lampung ?



2. Apa saja yang menjadi factor penghambat dan factor pendukung dalam implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam menagani kemiskinan di kota bandar lampung ?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review). Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan, melainkan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan guna memahami bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dalam konteks penanggulangan kemiskinan (Ibrahim, 2022). Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis teori implementasi kebijakan publik dari Merilee S. Grindle (1980) yang menekankan dua dimensi utama keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks pelaksanaan). Kedua aspek ini digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan PKH diterapkan di Kota Bandar Lampung, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dengan metode literature review, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran komprehensif tentang pelaksanaan PKH tanpa melakukan penelitian lapangan, namun tetap mengandalkan data sekunder resmi dan sumber ilmiah yang kredibel sebagai bahan analisis.

PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menangani Kemiskinan di Kota Bandar Lampung?

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menangani kemiskinan, termasuk di Kota Bandar Lampung. Implementasi PKH dilakukan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (KPM) pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, implementasi PKH tidak hanya dipahami sebagai proses penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk mengubah perilaku dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar. Melalui persyaratan seperti kehadiran sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin, PKH mendorong peningkatan partisipasi KPM terhadap layanan publik yang menjadi indikator penting penanganan kemiskinan (Yusyifa Nurfaridah & Abdul Maqin, 2021). Dengan demikian, implementasi PKH berkontribusi langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin di Kota Bandar Lampung.

Efek implementasi PKH terhadap penanganan kemiskinan di Kota Bandar Lampung terlihat dari meningkatnya kemampuan KPM dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Bantuan rutin dari PKH membantu keluarga mengurangi beban pengeluaran sehingga mereka dapat memprioritaskan kebutuhan penting seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, pemeriksaan ibu hamil, gizi balita, dan pengobatan dasar. Hal ini memberikan efek jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan. Implementasi PKH juga memengaruhi pola pikir masyarakat menuju kehidupan yang lebih mandiri, sehat, dan produktif. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa implementasi PKH belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi, sehingga diperlukan penguatan sisi pemberdayaan agar PKH tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dalam mengubah kondisi sosial dan ekonomi keluarga miskin (Taufik et al., 2025).



Secara regulatif, implementasi PKH di Kota Bandar Lampung memiliki dasar hukum yang kuat. Program ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Regulasi tersebut menetapkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan bantuan sosial dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Di tingkat daerah, implementasi PKH diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang bekerja sama dengan pendamping PKH di setiap kecamatan (Taufik et al., 2025). Dengan adanya dasar hukum tersebut, implementasi PKH memiliki legitimasi yang jelas sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi PKH di Kota Bandar Lampung tetap dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (Sugiyono, 2022), keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Dalam konteks PKH, faktor seperti komunikasi antaraktor pelaksana, ketersediaan sumber daya, kualitas pendamping, serta komitmen pemerintah daerah memengaruhi bagaimana program ini diterapkan dan sejauh mana mampu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun PKH telah memiliki kerangka hukum yang jelas dan tujuan yang terarah, keberhasilannya dalam menangani kemiskinan tetap bergantung pada kualitas implementasi program di lapangan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 56/III.08/HK/2023 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Wilayah Kota Bandar Lampung. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjadi pelaksana utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pendataan, serta pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Proses implementasi PKH di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan berdasarkan dua aspek utama teori Merilee Grindle, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

1. aspek isi kebijakan (content of policy), PKH dijalankan dengan tujuan yang jelas untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Jenis manfaat yang diberikan meliputi bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah, bantuan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta bantuan kesejahteraan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Keluarga penerima manfaat diwajibkan untuk mematuhi komitmen tertentu seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan.
2. aspek konteks implementasi (context of implementation), keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk sistem pelaporan yang terintegrasi antara pendamping sosial dan koordinator wilayah untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program.

Dalam praktiknya, implementasi PKH di Kota Bandar Lampung menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan laporan Dinas Sosial tahun 2024, terdapat penurunan jumlah keluarga miskin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan melalui PKH berhasil mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain peningkatan jumlah pendamping sosial, perbaikan sistem data penerima manfaat, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap tujuan program semakin meningkat.



Pemerintah juga perlu mengintegrasikan PKH dengan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha, serta pendampingan UMKM agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial semata.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, sesuai dengan teori Merilee S. Grindle (Sugiyono, 2022), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara isi kebijakan yang tepat dan konteks implementasi yang mendukung. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan pemutakhiran data menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas PKH sebagai kebijakan publik yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) di kota bandar lampung?

Dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung, ditemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan melalui dua variabel utama dari teori Merilee S. Grindle, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation).

1. Faktor Penghambat Implementasi PKH (Content of Policy dan Context of Implementation)

- a. Isi Kebijakan (Content of Policy), Berdasarkan dimensi isi kebijakan menurut Grindle, hambatan pertama adalah kurangnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Data penerima yang digunakan oleh Dinas Sosial masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya mutakhir. Akibatnya, masih terdapat penerima bantuan yang tidak lagi tergolong miskin, sementara keluarga miskin lainnya justru belum terdaftar. Selain itu, manfaat yang diterima belum sepenuhnya memadai untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh karena bantuan hanya bersifat konsumtif, bukan produktif (Larasati Chairani, 2024).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan derajat perubahan yang diharapkan. Meskipun PKH bertujuan untuk mengubah perilaku keluarga miskin agar lebih mandiri, implementasinya di lapangan sering kali masih bersifat jangka pendek. Perubahan perilaku sosial ekonomi masyarakat miskin memerlukan waktu dan dukungan tambahan berupa pelatihan keterampilan atau akses modal usaha, yang belum sepenuhnya tersedia di tingkat daerah (Larasati Chairani, 2024).

- b. Konteks Implementasi (Context of Implementation), Dalam konteks implementasi, hambatan utama terletak pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun struktur pelaksanaan sudah diatur secara hierarkis, masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan komunikasi yang kurang efektif antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Selain itu, jumlah tenaga pendamping sosial di lapangan belum memadai dibandingkan dengan jumlah keluarga penerima manfaat, sehingga pengawasan dan pembinaan belum optimal (Bola Pati et al., 2024).

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya pendukung seperti sarana transportasi, perangkat teknologi, dan fasilitas kantor yang diperlukan untuk memperlancar proses administrasi dan pemutakhiran data. Keterlambatan pencairan dana bantuan akibat proses birokrasi yang panjang juga menjadi masalah yang sering muncul di lapangan (Bola Pati et al., 2024).

2. Faktor Pendukung Implementasi PKH (Content of Policy dan Context of Implementation)

- a. Isi Kebijakan (Content of Policy), Faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung antara lain adanya kebijakan nasional yang kuat dan jelas, sehingga menjadi dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program ini.



Bentuk manfaat yang diberikan juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil. Dengan adanya bantuan ini, banyak anak dari keluarga miskin yang dapat melanjutkan pendidikan dan menjaga kesehatan mereka.

Selain itu, pelaksanaan program yang diiringi dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memberikan manfaat edukatif bagi penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan keluarga, dan pendidikan anak.

- b. Konteks Implementasi (Context of Implementation), Dari sisi konteks implementasi, dukungan dari pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan pendamping sosial menjadi kekuatan utama. Para pendamping sosial memiliki komitmen tinggi untuk mendampingi keluarga penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan mendorong perubahan perilaku. Selain itu, adanya kerja sama antara Dinas Sosial, bank penyalur, dan lembaga pendidikan maupun kesehatan juga membantu memperlancar pelaksanaan PKH.

Struktur birokrasi pelaksana program di Kota Bandar Lampung sudah memiliki alur yang jelas dan sistem koordinasi yang cukup baik. Proses evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara berkala melalui sistem informasi kesejahteraan sosial yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan demikian, meskipun masih terdapat hambatan, pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung dapat berjalan secara efektif karena dukungan kelembagaan dan sumber daya yang terus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menangani Kemiskinan di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini memiliki dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui implementasi yang berkelanjutan, PKH mampu mendorong masyarakat untuk mengakses layanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.

Jika dilihat dari teori Merilee S. Grindle (Sugiyono, 2022), keberhasilan implementasi kebijakan PKH di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Pada aspek isi kebijakan, tujuan, sasaran, dan manfaat program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, namun masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran penerima manfaat dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Sedangkan pada aspek konteks implementasi, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial sudah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi, efisiensi birokrasi, serta penyediaan fasilitas operasional yang memadai. Pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung juga telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka partisipasi sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, keterlambatan pencairan dana, dan belum optimalnya kegiatan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu dilakukan upaya penguatan program PKH



agar tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Secara keseluruhan, implementasi PKH di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan sudah berjalan efektif dan memiliki dampak yang nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, efektivitas tersebut akan semakin meningkat apabila pelaksanaan kebijakan disertai dengan sinergi yang kuat antara aktor pelaksana, peningkatan sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem pendataan dan pengawasan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisya, N. M. O., & Novira, A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 29. <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>
- Bola Pati, P. A. ... Wahyudi, C. (2024). Improving the Welfare of Poor Families through the Family Hope Program. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 05(03), 98-105. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2024.3.10>
- Ibrahim, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 113-137. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.3036>
- Julfani, L., & Putra, I. M. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 591-608. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2286>
- Larasati Chairani, A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang. *Iapa Proceedings Conference*, 325. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1062>
- Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, & Ni Made Witari Dewi. (2024). Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 214-223. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2674>
- Mubarok, S. ... Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33-38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Nuraulia, R. ... Nurhadi, S. P. (2023). Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 294-304. <https://doi.org/10.56672/dswjfn20>
- Putri Ayu Anisya. (2023). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 94-100. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2275>
- Qulsum, U. ... Putri, E. (2024). ANALISIS KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH UTAMA PEREKONOMIAN INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA: *Journal of Social and Library Science*, 2(2), 60-66.



<https://doi.org/10.70489/perspektif.v2i2.297e>. PERSPEKTIF: Journal of Social and Library Science, 2(2), 60-66. <https://doi.org/10.70489/perspektif.v2i2.297>

Sasmita, O. A. ... Hilal, S. (2023). Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung. J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 8(1), 1006. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1025>

Taufik, T. ... Amirulkamar, S. (2025). Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan: Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pidie Jaya. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(2), 686-700. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.366>

Yusyifa Nurfaridah, & Abdul Maqin. (2021). Impelementasi dan Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Keluarga Sangat Miskin. Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa, 2(2), 46-53. <https://doi.org/10.23969/brainy.v2i2.45>